

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan	8
2. Kegunaan	8
a. Kegunaan Teoritis	8
b. Kegunaan Praktis	9
1) Bagi Peneliti.....	9
2) Bagi Pemerintah.....	9
3) Bagi Masyarakat	10
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Jenis Data	13

a. Bahan Hukum Primer.....	13
b. Bahan Hukum Sekunder	14
c. Bahan Hukum Tertier.....	14
4. Pendekatan Penelitian	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II KERANGKA TEORETIS

1. Teori Otonomi Daerah	18
2. Teori Kewenangan	23
3. Teori Kepastian Hukum	28
4. Teori Perizinan.....	30
5. Teori Pertambangan	32

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pandeglang	35
B. Usaha Pertambangan Di Kabupaten Pandeglang	38
C. Wawancara Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Pandeglang	46

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN DAN HAMBATAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu	
---	--

Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	55
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) Di Kabupaten Pandeglang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	